UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Kewenangan Kepala Dinas Kehutanan dalam Penyelenggaraan Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta
Fregina Dasilva, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asmara, Galang, *et al*., *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2025.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2025 Volume 53*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2003.

_____. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Koentjoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Kristiawanto. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Klaten: PT Nas Media Indonesia, 2024.

Latief, Abdul. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia.* Bandung: PT. Alumni, 1997.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2001.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Kewenangan Kepala Dinas Kehutanan dalam Penyelenggaraan Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta
Fregina Dasilva, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

_____. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud M.D. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

_____. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Nalle, Victor Imanuel W. *Konsep Uji Materiil: Kajian Pembentukan dan Uji Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2013.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ridwan. *Hukum Administrasi di Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

_____. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah.* Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Saputra, M. Nata. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: CV. Rajawali, 1988.

Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2005.

Soehino. *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Sumardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.

Haryati, Dwi, *et al*., *Hukum Administrasi Negara: Konsep, Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Kewenangan Kepala Dinas Kehutanan dalam Penyelenggaraan Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta
Fregina Dasilva, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Jurnal dan Prosiding

Herman dan Hendry Julian Noor. "Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (*Beschikking*)." *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, No. 1 (2017): 92. https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240.

Kusumoarto, Andrianto, Asri Budiarto, Arie Fajar Septa, dan Maulana Ibrahin Assegaf. "Perencanaan Perluasan Hutan Kota Munjul, Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Faktor Exacta* 12, No. 2 (2019): 75. http://dx.doi.org/10.30998/faktorexacta.v12i2.3777.

Mukhlison. "Pemilihan Jenis Pohon untuk Pengembangan Hutan Kota di Kawasan Perkotaan Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Kehutanan* VII, No. 1 (2013): 38. https://doi.org/10.22146/jik.6136.

Razak, Abdul dan Zulkifli Aspan. "Peran Peraturan Kebijakan (*Beleidsregels*) dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." *Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN* 2, No. 1 (2024): 17. https://doi.org/10.55292/nj810e31.

Sastrini, Luh Ketut Ayu Manik dan Ni Made Witari Dewi. "Peranan Peraturan Kebijakan dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, No. 2 (2024): 215. https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2674.

Subarudi dan Ismayadi Samsoedin. "Kajian Kebijakan Hutan Kota: Studi Kasus di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI)." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 9, No. 2 (2012): 151. DOI:10.20886/jakk.2012.9.2.144-153.

Suryandari, Elvida Yosefi dan Subarudi. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutana*n 11, No. 3 (2014): 308. DOI: 10.20886/jakk.2014.11.3.297-309.

Suryandari, Elvida Yosefi dan Iis Alviya. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyelenggaraan Hutan Kota: Studi Kasus Kota Medan, Deli Serdang dan Palangka Raya." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 12, No. 1 (2015): 27. DOI:10.20886/jpsek.2015.12.1.13-30.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Kewenangan Kepala Dinas Kehutanan dalam Penyelenggaraan Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta
Fregina Dasilva, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Wicaksono, Dian Agung dan Faiz Rahman. "Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Negara Hukum* 11, No. 2 (2020): 242. https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1614.

Yuniza, Mailinda Eka, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, dan Ni Putu Maetha Maharani. "Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan dan Prospek Pengaturannya dalam Ius Constituendum." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, No. 4 (2023): 837. DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i0 4.p7.

Tesis

Arckirus, Pilemon. "Kewenangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dalam Melaksanakan Perlindungan Hutan Produksi di Kabupaten Kupang dalam Sistem Desentralisasi", *Tesis* Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2009.

Padeatu, Helena A. "Kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Era Otonomi Daerah", *Tesis* Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2004.

Sidabutar, Briantonny. "Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan dan Penyelenggaraan Hutan Kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta", *Tesis* Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4744).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Kewenangan Kepala Dinas Kehutanan dalam Penyelenggaraan Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta
Fregina Dasilva, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3721).

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4242).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6635).

Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 484).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 201).

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 216 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 73013).

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 280 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 62178).

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 404 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pengadaan Tanah Kehutanan (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 62301).

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2017

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Analisis Kewenangan Kepala Dinas Kehutanan dalam Penyelenggaraan Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta
Fregina Dasilva, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

tentang Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Nomor 74001).

Lain-Lain

Instruksi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengelola Lokasi Hasil Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun Anggaran 2018.

Standar Operasional Prosedur Nomor 2026/-073.7 Tanggal 18 Juli 2022 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RTH di Bawah 5 (Lima) Hektar dari Penawaran Masyarakat.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/wenang, diakses 10 Januari 2026.

Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta, "Tentang Jakarta". https://www.jakarta.go.id/tentang-jakarta (diakses 29 Mei 2025).

Pujianti, Sri. "Waktu Pemindahan IKN Bergantung pada Pemberlakuan Keputusan Presiden." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/berita/waktu-pemindahan-ikn-bergantung-pada-pemberlakuan-keputusan-presiden-25031 (diakses 15 Mei 2026).